

KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL: SEBUAH STUDI LITERATUR

Nurafni Irma Suryani¹⁾, Ratu Eva Febriani²⁾

¹ Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu
email : nurafniirmasuryani@gmail.com

² Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu
email : ratuevafebriani@unib.ac.id

Abstract

Special Economic Zones are very important for the progress of an area. SEZ is able to contribute to the regional economy and increase economic development by providing direct and indirect effects. The purpose of this study is to determine the impact of special economic zones on regional economic development. The object of this study is to explore the establish SEZ in Indonesia just only refer to two SEZs namely SEI Mangke and Tanjung Lesung. This research used literature study as a method. The results show that SEZ make the regional economy is starting to move towards a better direction. The role of two SEZs observed have different impact on regional economy, SEI Mangke has a positive impact on macroeconomy indicator such as reduced unemployment, reduced poverty and an increased economic growth rate in Simalungun Regency. Otherwise, Tanjung Lesung just has a positive impact on MSMEs.

Keywords: Unemployment, Poverty, Economic Growth, Pengembangan UMKM, SEZ Sei Mangke, SEZ Tanjung Lesung

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah merancang beberapa strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekspor melalui investasi domestik maupun asing. Salah satu strategi utama yang digunakan pemerintah Indonesia adalah penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan strategis. Selama 44 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami evolusi dalam pengembangan kawasan strategis yang berada pada periode dan lokasi yang berbeda-beda.

Secara singkat, sejarah pengembangan kawasan strategis di Indonesia dimulai pada tahun 1970, dengan inisiasi pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau disebut juga dengan *Free Trade Zone (FTZ)*. Selanjutnya pada tahun 1972 Indonesia mulai merancang Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse Zones*). Perkembangan selanjutnya diikuti oleh pembentukan Kawasan Industri pada tahun 1989, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada tahun 1996, dan yang terbaru Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2009.

Pada tahun 2009, usaha pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kawasan khusus dilanjutkan dengan pembentukan KEK. KEK didefinisikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK akan menjadi basis bagi kegiatan industri, ekspor, impor, dan aktivitas lainnya dengan nilai ekonomi tinggi, untuk menunjang daya saing nasional. KEK terdiri atas satu atau lebih dari zona-zona berikut ini: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, energi, dan zona ekonomi lainnya.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mencakup penetapan kriteria pokok pemilihan lokasi suatu daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan KEK, menyetujui kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh kawasan-

kawasan itu, dan yang paling penting adalah untuk menyediakan pelayanan investasi dan kelembagaan yang memiliki standar internasional.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa KEK merupakan bagian utama dan terpenting dari kerangka kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri ekspor. Alasan dari penerapan kebijakan ini adalah pertama, KEK dapat menciptakan industri yang kompetitif dalam sebuah negara. Industri ini kemudian dapat meluas dan bervariasi. KEK juga bisa diterapkan sebagai lokasi untuk melakukan eksperimen kebijakan baru yang bersifat pasar bebas (*free-market*), dimana jika berhasil bisa dijadikan sebagai referensi kebijakan di daerah lain. Kedua, KEK sering digunakan sebagai alat untuk mendorong aktivitas ketenagakerjaan. Ketiga, KEK juga berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia (*human capital*). Keempat, karena KEK merupakan area di mana perusahaan dalam negeri berinteraksi dengan perusahaan luar negeri, pembentukan KEK memungkinkan perusahaan domestik untuk belajar banyak dari perusahaan luar negeri. Terakhir, KEK bisa dibentuk dari berbagai alasan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab otoritas pemerintah untuk menyesuaikan jasa-jasa yang disediakan di KEK yang dibentuk sehingga bisa mencapai target bagi masing-masing otoritas.

Sebelum Indonesia mengembangkan KEK, negara luar sudah terlebih dahulu melakukan pengembangan KEK seperti China, Korea Utara, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Irlandia dan negara lainnya. Salah satu kawasan ekonomi khusus yang sukses adalah China. Pengembangan KEK tersebut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi China. Faktor yang mendukung kesuksesan KEK China tidak terlepas dari beberapa langkah yang diambil China seperti komitmen yang kuat dari pimpinan, kebijakan preferensial dan otonomi kelembagaan yang luas. Keberhasilan ini menjadikan China memiliki persentase kontribusi yang besar pada pertumbuhan KEK dunia.

Belajar dari negara luar, Indonesia juga sudah melakukan pengembangan KEK. Adapun melatarbelakangi inisiatif pemerintah untuk membentuk KEK. Pertama, timpangnya postur perekonomian Indonesia yang lebih didominasi oleh kawasan barat Indonesia (terutama Jawa dan Sumatera). Hingga tahun 2009, PDRB daerah-daerah di kawasan timur Indonesia hanya menyumbang 19% dari total PDRB di seluruh daerah. Selain itu, didorong oleh banyaknya kisah sukses pengembangan KEK di negara luar, Indonesia mulai menerapkan KEK pada tahun 1970an dengan menjadikan daerah Bintan, Batam dan Karimun sebagai percontohan.

Hingga kini, dua belas wilayah KEK yang telah ditetapkan diseluruh Indonesia. Kedua belas wilayah tersebut telah tersebar di beberapa pulau yaitu pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Papua, pulau Maluku, pulau Bangka dan pulau Sulawesi. Pulau Sumatera wilayah KEK yang ditetapkan adalah Sumatera Utara, NAD, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. Pulau Jawa wilayah yang ditetapkan sebagai KEK hanya satu yaitu Banten. Pulau Papua ada 2 wilayah yaitu Papua Barat dan NTB. Kemudian pulau Kalimantan, Bangka dan Maluku masing-masing memiliki satu wilayah yang ditetapkan yaitu Kalimantan Timur, Bangka Belitung dan Maluku. Terakhir pulau Sulawesi wilayah yang ditetapkan adalah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Sejauh ini belasan KEK telah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Pengembangannya berdasarkan potensi-potensi demografis dan aksesibilitas kawasan tersebut ke pasar global. Diharapkan dengan pengembangan sesuai potensinya tersebut, KEK mampu mengundang lebih banyak investor, mengelola industri, ekspor-impor, dan menggeliatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan kegiatan ekonomi berskala tinggi dan berdaya saing global di kawasan tersebut. Kenyataannya, bahwa kawasan ekonomi khusus di Indonesia belum ada yang berhasil seperti KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kalayang. Sejauh ini, hampir 11 tahun Indonesia mengenal KEK belum ada terlihat dampak positif dari kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut. Sudah cukup banyak regulasi dikeluarkan tapi masih belum berhasil. Padahal pemerintah melalui kementerian keuangan telah memberikan banyak fasilitas bagi investor yang akan masuk ke KEK

mulai dari PPh, PPN, kepabeanan dan cukai. Jika merujuk pada Undang-undang KEK harus siap beroperasi setelah 3 tahun. Namun KEK Mandalika sudah 4 tahun beroperasi dan Tanjung Kalayang 2 tahun berjalan, tetapi masih jauh dari harapan (Julita, 2018).

Berdasarkan hasil diskusi dari BUPP KEK yang telah beroperasi, masalah yang sering kali dihadapi adalah terkait dengan fasilitas dan kemudahan, terutama mengenai implementasinya (DKEK, 2018). Sedangkan menurut CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*) menyatakan ada delapan masalah dalam pengembangan KEK yaitu struktur kelembagaan, koordinasi antar lembaga pemerintahan kurang bersahabat, sistem intensif dan peraturan belum ada kejelasan, pembangunan infrastruktur, penentuan lokasi dan aglomerasi, akses ke pasar internasional dan domestik harus dioptimalkan, ketenagakerjaan, dan lahan dan pertanahan (CSIS, 2015).

Hal yang paling penting dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah infrastuktur. Berdasarkan sejarah perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia, infrastruktur ditempatkan sebagai *sektor vital* dalam proses mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, pengembangan KEK harus mampu memberikan perubahan terhadap ekonomi suatu wilayah KEK yang ditetapkan. Belajar dari dua kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan yaitu KEK Sei Mangke dan KEK Tanjung Lesung. Selama 4 tahun beroperasi 2 kawasan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi wilayah.

Selain itu, pengembangan KEK harus mampu memberikan perubahan terhadap ekonomi suatu wilayah KEK yang ditetapkan. Belajar dari dua kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan yaitu KEK Sei Mangke dan KEK Tanjung Lesung. Selama 4 tahun beroperasi 2 kawasan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi wilayah.

Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Untuk ide ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti China dan India. Bahkan data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.

Pemberlakuan status KEK bagi daerah tertentu sangat memberikan keuntungan ekonomi secara nasional maupun regional. Tetapi, status ini juga berpotensi merugikan, karena adanya pengurangan pendapatan pajak akibat adanya insentif fiskal, dan dapat mengancam kawasan industri yang telah ada untuk pindah ke KEK yang berdampak pengurangan terhadap penerimaan negara. Nyatanya tidak semua KEK berhasil di terapkan, dari hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan di beberapa negara. Hal yang paling utama adalah lokasi KEK yang ditujuk berada didaerah terpencil (*Remote Area*), sehingga membutuhkan biaya yang tinggi, disamping fasilitas infrastruktur tak memadai, dan belum terdapat mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam pengembangannya. Menengok kegagalan ini maka KEK yang akan dikembangkan di Indonesia harus berada di lokasi yang strategis, dekat dengan jalur perdagangan atau pelayaran internasional, memiliki infrastruktur yang memadai, serta perlunya menggunakan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta dalam pengembangan KEK tersebut.

Sementara itu, perbedaan utama KEK dengan kawasan ekonomi lainnya, selain kemudahan yang diberikan adalah banyaknya peran Pemerintah Daerah, baik dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan. Hal itu menyebabkan perlunya kerjasama Pemerintah-Swasta dalam pengelolaan KEK, mengingat dana untuk KEK ini sangat besar. Hasil studi dari beberapa

negara menunjukkan, KEK yang sepenuhnya dikelola oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah.

Pembentukan KEK diharapkan akan mampu meningkatkan investasi atau usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat kemiskinan. Secara nasional, tujuan yang ingin dicapai meliputi pemerataan ekonomi, terutama dari sudut pandang pendapatan, dan daya saing produk nasional. Sesuai dengan konsep pembentukan kawasan ekonomi khusus, dibutuhkan persiapan yang menyeluruh serta komitmen dari seluruh yang berkepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan tersebut. Persiapan yang meliputi kebijakan dan kelembagaan, insentif dan pembiayaan serta dukungan infrastruktur yang sesuai dengan tata ruang wilayah. KEK dengan demikian menjadi sangat penting dalam peningkatan investasi asing di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, telah dipaparkan mengenai kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Untuk itu ada keinginan penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai dampak KEK terhadap perkembangan ekonomi wilayah dengan mengangkat judul penelitian “Studi Literatur Dampak KEK Sei Mangke dan KEK Tanjung Lesung terhadap Perekonomian Wilayah. Tujuan Penelitian studi literatur ini adalah untuk mengetahui dampak kawasan ekonomi khusus terhadap perkembangan ekonomi wilayah.

LANDASAN TEORI

Teori Lokasi

Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar. Hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan cenderung memilih lokasi yang dapat meminimumkan biaya namun memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Menurut Tarigan (2012) studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan atau berjauhan tersebut. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang berpergian dari satu lokasi kelokasi lainnya (Tarigan, 2012). Weber dalam Tarigan (2012) menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum akan menghasilkan keuntungan yang maksimum.

Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*) dimana setiap sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Menurut Pasal 31, UU No.25 / 2007 (UU KEK No.39 / 2009) Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Menurut Walsh (2013) Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) atau *special economic zone* (SEZ) adalah suatu area geografis terbatas yang diatur oleh aturan dan hukum yang spesifik.

Definisi yang mirip juga disampaikan oleh Deepak (2012) bahwa KEK adalah suatu wilayah geografis yang hukum ekonominya lebih liberal dibandingkan dengan hukum ekonomi yang ada di negara tersebut. Juga dari Khan and Varshney (2012) yang mendefinisikan KEK sebagai suatu wilayah geografis dimana hukum ekonominya berbeda dengan hukum ekonomi yang diterapkan dinegara tersebut dengan tujuan utama adalah untuk menarik investasi luar negeri langsung (FDI). Kawasan ekonomi khusus (KEK) atau *Special Economic Zone* (SEZ) adalah wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi yang berlaku disuatu negara. Kawasan ekonomi khusus memiliki jenis wilayah yang lebih khusus mencakup Daerah Perdagangan Bebas - Free Trade Zone (FTZ), Daerah Perdagangan Ekspor- *EXPORT Processing Zones* (EPZ), Daerah Bebas - *Free Zones* (FZ), Kawasan Industri - *Industrial Estates* (IE), Pelabuhan Bebas - *Free Portss* (FP) dan sebagainya.

Special Economic Zone (SEZ) sendiri memiliki pengertian yang menurut Ishida merupakan sebagai wilayah geografis tertentu dengan hukum ekonomi yang lebih liberal dari pada hukum ekonomi sebuah negara. Sedangkan menurut Wei Ge, dari perspektif luas, bahwa *Special Economic Zone* (SEZ) dapat dicirikan secara umum, sebagai daerah geografis dalam wilayah sebuah negara dimana kegiatan jenis ekonomi tertentu dipromosikan oleh seperangkat instrumen kebijakan yang tidak umum berlaku ke seluruh negara (Arafat, 2010). Berdasarkan Undang-undang No. 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disebutkan bahwa kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dalam batas tertentu dalam wilayah NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan tertentu dimana diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perijinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan. Maksud pengembangan KEK adalah untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor-impor serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus antara lain adalah: membantu atau mendukung perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki struktur industri di lokasi tersebut, meningkatkan ekspor dan meningkatkan cadangan devisa. Untuk itu maka pendekatan kawasan untuk pengembangan investasi harus bercirikan pada: 1) "Reasonable": Layak secara ekonomi, sosial dan politik, 2) "Sustainable": Berorientasi jangka panjang, dan 3) "Measurable": Jelas dalam instrumen dan target.

Adapun kriteria pokok pemilihan lokasi KEK yang ditentukan oleh Tim Nasional KEK adalah 1) Komitmen Pemerintah Daerah, 2) Rencana Tata Ruang, 3) Aksesibilitas, 4) Infrastruktur, 5) Lahan, 6) Tenaga kerja, 7) Industri Pendukung, 8) Geoposisi, 9) Dampak Lingkungan, 10) Batas Wilayah. Pada umumnya, sasaran penetapan KEK adalah meningkatkan investasi saing di suatu negara dengan menyediakan berbagai insentif berupa :

1. Insentif Perpajakan :
 - a. PPN
 - b. PPaBM
 - c. PPh Pasal 22
 - d. Tax Holiday
2. Insentif Kepabeanan, berupa pembahasan atau pengurangan tarif dan atau penyederhanaan prosedur:
 - a. Cukai
 - b. Bea Masuk (BM)
3. Insentif Penanam Modal, dengan menyederhanakan syarat dan prosedur.
4. Insentif Perlindungan lingkungan hidup.

Menurut pedoman yang di keluarkan Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (Departemen Perindustrian, 2006): lokasi yang dipilih menjadi KEK minimal harus memenuhi kriteria ekonomi sebagai berikut :

1. Terletak dijalur perdagangan internasional atau alur laut utama di Indonesia.
2. Terdapat pasar potensial berskala internasional.
3. Bagian dari wilayah yang memiliki sumber daya alam atau sektor unggulan yang berdaya saing internasional.
4. Ketersediaan tenaga kerja lokal, baik jumlah maupun kualitas.

Sementara kriteria fisik yang harus dipenuhi oleh suatu Kawasan Ekonomi Khusus adalah sebagai berikut :

1. Kawasan andalan yang memiliki keterkaitan tinggi dengan kawasan andalan lainnya dan wilayah sekitarnya.
2. Mempunyai akses transportasi jaringan jalan dengan waktu tempuh ke pelabuhan atau bandar udara tidak lebih dari 3 jam.
3. Tersedianya infrastruktur sumber daya air, suplai tenaga listrik dan telepon berskala internasional dalam kapasitas mencukupi.
4. Bukan merupakan kawasan lindung.
5. Berdekatan atau memiliki akses yang baik dengan kota yang berstatus pusat kegiatan nasional (PKN).

Selain Indonesia, telah banyak negara yang berusaha menarik investor asing dengan menerapkan KEK untuk menggairahkan perekonomian negara tersebut. Diantaranya banyak KEK, ada yang berhasil mengalami pertumbuhan dengan pesat seperti Shenzen di RRC, dan ada yang gagal total sama sekali seperti di Korea Utara. Pengambilan keputusan pemerintahan suatu negara dalam menetapkan suatu wilayah sebagai KEK didasari kepada keunggulan yang dimiliki oleh kawasan tersebut umumnya memiliki :

1. Keunggulan biografis, letak suatu kawasan yang sangat dekat dengan negara tetangga/perbatasan dan atau jalur perdagangan dunia dengan beragam kekhususannya (orientasi ekspor, substitusi impor dan lain sebagainya).
2. Sumber alam, sumber alam tertentu merupakan daya tarik tersendiri dalam penetapan suatu wilayah menjadi KEK, dan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber alam yang kaya perlu membuat *cluster* KEK di berbagai daerah sehingga setiap daerah memiliki pusat perekonomian tersendiri dalam konteks KEK.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keunggulan mencakup kedua hal tersebut di atas karena :

1. Banyak sumber alam tertentu yang tidak dimiliki oleh negara lain.
2. Adanya wilayah-wilayah yang secara geografis memiliki keunggulan untuk dikembangkan menjadi KEK.
3. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan perairan laut atau darat, dengan wilayah negara lain atau perairan internasional.

Penelitian Terdahulu

Silvia (2015) meneliti analisis pengaruh infrastruktur pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangke terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan ketersediaan infrastruktur setelah ditetapkannya Sei Mangkei sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta untuk melakukan estimasi pengaruh variabel infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun dan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah ditetapkannya KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Analisis ini menggunakan data *time series*. Hasil menunjukkan infrastruktur pembangunan KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun terus meningkat kecuali panjang jalan yang tidak mengalami perkembangan. Berdasarkan model dalam analisis, infrastruktur jalan positif tidak signifikan, listrik positif signifikan, dan air bersih negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun dan keberadaan KEK Sei

Mangkei berpengaruh positif terhadap masyarakat Kabupaten Simalungun terutama dalam hal sosial ekonomi masyarakat.

Maftuhah (2017) meneliti dampak pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) terhadap pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengembangan kawasan ekonomi khusus terhadap pertumbuhan UMKM Tanjung Lesung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KEK memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM di Tanjung Lesung, karena UMKM mengalami peningkatan omzet penjualan dan pertumbuhan pelanggan karena disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan ke Tanjung Lesung.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2009). Dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan studi komparatif yang berarti penelitian yang bertugas untuk membandingkan dua objek. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu (Sugiyono, 2006). Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu (Nazir, 2005). Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, maupun instansi yang terkait dalam hal ini Badan Pusat Statistik masing-masing daerah yang akan diteliti. Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkembangan kawasan ekonomi, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen.

Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011).

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013).

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di sekolah dengan tenaga pendidikan dan kependidikan, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk lisan maupun tertulis. Analisis deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah. Dalam penelitian ini hanya menggambarkan tentang karakteristik dan ciri-ciri individu, situasi atau kelompok tertentu, penelitian ini relatif sederhana yang tidak memerlukan teoritis rumit atau pengajuan hipotesis tertentu (Ruslan, 2012).

Penelitian merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal terkait kawasan ekonomi khusus (KEK). Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk membandingkan dan mengetahui perkembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Alat analisis yang digunakan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian studi literatur, saat ini telah ada 59 wilayah pengusul KEK yang tersebar di Indonesia. Namun yang ditetapkan hanya 12 kawasan ekonomi khusus di seluruh wilayah Indonesia. Berikut ini Tabel 1 akan disajikan Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan dari tahun 2009-2019.

Tabel 1 KEK di Indonesia yang Beroperasi dan Tahap Pembangunan

No	Nama KEK	Lokasi	Tanggal Ditetapkan	Status Operasional	Tanggal Beroperasi	Zona
1	Sei Mangke	Kab. Simalungun (Sumatera Utara)	27/02/2012	Beroperasi	27/01/2015	Industri
2	Tanjung Lesung	Kab. Pandeglang (Banten)	23/02/2012	Beroperasi	23/02/2015	Pariwisata
3	Palu	Kab. Palu (Sulawesi Tengah)	16/05/2014	Beroperasi	9/7/2017	Industri
4	Mandalika	Kab. Lombok Tengah	30/06/2014	Beroperasi	20/10/2017	Pariwisata

No	Nama KEK	Lokasi	Tanggal Ditetapkan	Status Operasional	Tanggal Beroperasi	Zona
5	Galang Batang	(Nusa Tenggara Barat) Kab. Bintan (Kepulauan Riau)	12/10/2017	Beroperasi	8/12/2018	Industri
6	Arun Lhokseumawe	Kab. Lhokseumawe (Aceh)	17/02/2017	Beroperasi	14/12/2018	Industri
7	Tanjung Kelayang	Kab. Belitung (Bangka Belitung)	15/03/2016	Beroperasi	17/08/2018	Pariwisata
8	Bitung	Kab. Bitung (Sulawesi Utara)	16/05/2016	Beroperasi	1/4/2019	Industri
9	Morotai	Kab. Morotai (Maluku Utara)	30/06/2014	Beroperasi	1/4/2019	Pariwisata
10	Maloy Batuta	Kab. Kutai timur (Kalimantan Timur)	17/10/2014	Beroperasi	1/4/2019	Industri
11	Tanjung Api-api	Kab. Banyuasin tengah (Sumatera Selatan)	30/06/2014	Tahap pembangunan		Industri
12	Sorong	Kab. Sorong (Papua)	1/8/2016	Tahap pembangunan		Industri

Sumber : Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia, 2019

Berdasarkan hasil studi literatur yang ditelaah terhadap KEK Sei Mangke ada 3 indikator dampak KEK yaitu PDRB, kesempatan kerja dan kemiskinan. Dan KEK Tanjung Lesung ada tiga indikator yaitu pertumbuhan UMKM, pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja, dapat dilihat pada Tabel .2

Tabel 2 Indikator Dampak Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Ekonomi Wilayah

KEK Sei Mangke	KEK Tanjung Lesung
1. Kesempatan Kerja meningkat	1. Pertumbuhan UMKM
2. Kemiskinan menurun	- Omzet Penjualan meningkat
3. PDRB meningkat	- Pertumbuhan Tenaga Kerja menurun
	- Pertumbuhan Pelanggan meningkat
	2. Pendapatan masyarakat meningkat
	3. Kesempatan Kerja menurun

Sumber : Studi Literatur, 2019

Perekonomian Simalungun yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai Rp 32,86 triliun, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 24,72 triliun. Perekonomian Simalungun pada tahun 2017 bila dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 5,13 persen. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Jasa pendidikan merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 8,03 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 7,86 persen serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,36 persen. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi memiliki pertumbuhan terendah yaitu hanya sebesar 1,26 persen. Tabel 3 memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2014-2017.

Tabel 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun 2014-2017

No	Tahun	Persentase
1	2014	5,30
2	2015	5,20
3	2016	5,40
4	2017	5,20

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2019

KEK yang dikembangkan juga harus mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pada Tabel 4 memperlihatkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

Tabel 4 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun tahun 2014-2018

Kemiskinan	2014	2015	2016	2017	2018
Garis kemiskinan	274867	283234	315947	331860	342477
Penduduk miskin (Jiwa)	86250	92890	92190	91350	80300
Persentase penduduk miskin	10,20	10,96	10,81	10,65	9,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Simalungun 2019

Jika keberadaan KEK mampu mengurangi pengangguran. Pada Tabel 4.5 memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Simalungun.

Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Simalungun

No	Tahun	Persentase
1	2014	7.48
2	2015	5.19
3	2016	5.3
4	2017	5.62
5	2018	5.1

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, 2019

Selanjutnya, dilihat dari Tabel 4.6 menjelaskan laju PDRB Kabupaten Pandeglang dari tahun ke tahun relatif meningkat. Pada tahun 2014 PDRB Kabupaten Pandeglang sebesar 4.93 persen kemudian meningkat di tahun 2015 sebesar 5.81 persen. namun di tahun 2016 PDRB Kabupaten Pandeglang menurun menjadi 5.52 persen dan meningkat di tahun 2017 sebesar 6.05 persen. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pandeglang didukung oleh tiga lapangan usaha yaitu informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan, dan konstruksi. Kemudian diikuti lapangan usaha jasa pendidikan.

Tabel 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pandeglang 2014-2017

No	Tahun	Pertumbuhan ekonomi (persen)
1	2014	4.93
2	2015	5.81
3	2016	5.52
4	2017	6.05

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang, Olahan Penulis 2019

Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dari tahun 2014 sampai 2017 relatif meningkat. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin sebesar 9.5 persen dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 10.43 persen. Kemudian di tahun 2016 sebesar 9.67 persen dan ditahun 2017 sedikit meningkat sebesar 9.74 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014-2017

Kemiskinan	2014	2015	2016	2017
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	237111	247073	267752	285822
Penduduk miskin (jiwa)	113140	124420	115900	117310
Persentase penduduk miskin	9.5	10.43	9.67	9.74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, 2019

Tabel 8 menunjukkan data UMKM di Tanjung Lesung sebelum dan sesudah ditetapkannya sebagai kawasan ekonomi khusus, dilihat dari sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa pada tahun 2009 berjumlah 4, tahun 2010 berjumlah 5 dan tahun 2011 juga berjumlah 5 UMKM. Disektor perdagangan ada rumah makan yang tidak mampu mempertahankan usahanya sehingga harus tutup, hal ini dikarenakan masih sepiwisatawan. Data pertumbuhan UMKM dari sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa di KEK Tanjung Lesung setelah KEK ditetapkan UMKM mulai bermunculan. Pada tahun 2012 UMKM berjumlah 8, tahun 2013 berjumlah 14, tahun 2014 berjumlah 18, tahun 2015 berjumlah 26 dan tahun 2016 berjumlah 30 UMKM. Dapat disimpulkan sebelum adanya KEK Tanjung Lesung UMKM belum bermunculan. Setelah adanya KEK UMKM mulai bermunculan sehingga mengalami peningkatan.

Tabel 9 Data Jumlah UMKM Sebelum dan Setelah ditetapkannya KEK Tanjung Lesung

Sektor	Sebelum			Setelah				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Perdagangan	2	2	1	3	4	5	5	5
Industri Pengolahan	-	-	-	-	1	-	2	4
Jasa	2	3	4	5	9	14	19	22
Total	4	5	5	8	14	19	26	31

Sumber : Kecamatan Panimbang dan Kantor Desa Tanjung Jaya, 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak KEK terhadap Perkembangan Ekonomi Wilayah

Pada pembahasan studi literatur dampak KEK terhadap perkembangan wilayah hanya membahas 2 KEK saja yaitu KEK Sei Mangke dan KEK Tanjung Lesung. Ada 3 variabel yang akan dibahas dalam KEK Sei Mangke yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, tingkat kemiskinan Kabupaten Simalungun dan TPT Kabupaten Simalungun. Kemudian, dampak yang dibahas dalam KEK Tanjung Lesung ada 5 yaitu pertumbuhan UMKM, pendapatan masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang, tingkat kemiskinan Kabupaten Pandeglang, dan kesempatan kerja. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Sebagaimana hasil penelitian Silvia (2015) bahwa KEK Sei Mangke memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dengan adanya KEK Sei Mangke memperluas lapangan kerja sehingga pengangguran berkurang. Dalam setahun terakhir pengangguran berkurang 780 orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,10% pada Agustus 2018. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) umum masih mendominasi yaitu sebesar 9,67%. Disisi lain

hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun sebanyak 80.300 jiwa atau sebesar 9,31% terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Simalungun mengalami penurunan dimana kondisi Maret 2017 jumlah penduduk miskinnya sebanyak 91.350 jiwa atau sebesar 10,65%. Ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 11.050 jiwa dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,34 poin.

Selain KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Lesung sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurut penelitian Maftuhah (2017) dan Devi (2015) menyatakan bahwa KEK Tanjung Lesung memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan UMKM. Dari hasil penelitian Devi (2015) bahwa KEK Tanjung Lesung memberikan dampak ekonomi langsung, ekonomi tidak langsung serta ekonomi lanjutan. Dampak ekonomi langsung adalah pendapatan yang diperoleh unit usaha dari pengeluaran wisatawan di dalam kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Adanya unit usaha di KEK Tanjung Lesung membantu memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di lokasi wisata. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan di lokasi wisata yaitu tiket masuk, konsumsi, dan penginapan. Unit usaha yang dianalisis yaitu *homestay*, rumah makan dan *beach club*.

Pendapatan *Beach Club* jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan unit usaha lain yaitu sebesar Rp 4.782.000.000 per tahun. Hal ini dikarenakan *Beach Club* merupakan satu-satunya obyek wisata yang sudah beroperasi di KEK Tanjung Lesung. Walaupun hanya ramai pada waktu-waktu tertentu namun biaya yang harus dikeluarkan wisatawan di dalam kawasan cukup besar. Letak KEK Tanjung Lesung yang jauh juga menyebabkan wisatawan rela menghabiskan waktu berjam-jam di lokasi wisata untuk menikmati pemandangan dan bermain di pantai walaupun mayoritas wisatawan memilih untuk melakukan satu kali perjalanan (pulang pergi). Adanya beberapa jenis restoran dan fasilitas bermain serta penginapan di dalam lokasi *Beach Club* juga menyebabkan tingginya pendapatan unit usaha tersebut karena *Beach Club* kembali memungut bayaran untuk seluruh kegiatan tersebut.

Dampak ekonomi langsung yang diperoleh oleh unit usaha *homestay* lebih besar jika dibandingkan dengan unit usaha rumah makan. Dampak ekonomi langsung unit usaha *homestay* sebesar Rp 1,573,226,667 dan memiliki presentase 22.63%. Nilai tersebut diperoleh karena jumlah populasi unit usaha *homestay* lebih banyak jika dibandingkan dengan rumah makan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Tanjung Jaya lebih tertarik memiliki usaha *homestay* daripada rumah makan, karena dengan unit usaha *homestay* mereka dapat memanfaatkan ruangan atau kamar kosong di rumah mereka atau merenovasi sebagian rumah mereka untuk dijadikan *homestay*, sedangkan jika mereka memiliki unit usaha rumah makan mereka harus menyediakan bangunan khusus untuk lokasi rumah makan tersebut. Tingkat hunian *homestay* atau *occupancy rate* dalam seminggu sebesar 42.86%, dihitung dari banyaknya hari mayoritas wisatawan menginap dibagi total hari dalam seminggu dikalikan seratus. Total dampak ekonomi langsung dari KEK Tanjung Lesung adalah sebesar Rp 6.953.226.667 per tahun. Dampak ekonomi langsung diperoleh dari hasil perkalian rata-rata pendapatan unit usaha per tahun dengan jumlah populasi unit usaha

Berdasarkan hasil penelitian Maftuhah (2017) menyatakan KEK Tanjung Lesung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM di Tanjung Lesung. Hal ini dilihat dari 3 indikator yaitu omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pelanggan. Para pemilik *Homestay* dan Rumah makan merasakan semenjak adanya KEK Tanjung Lesung tamu yang datang untuk menginap di *Homestay* dan makan di Rumah makan mereka terjadi peningkatan setiap tahunnya bahkan setiap bulannya. Hal ini tentunya membuat omzet penjualan mereka pun meningkat. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang dirasakan oleh pelaku UMKM Batik Cikadu Tanjung Lesung bahwa penjualan mereka meningkat bukan karena KEK Tanjung Lesung. Namun, karena penjualan di KEK Tanjung Lesung itu masih kurang, karena

sulitnya pemasaran. Peningkatan penjualan tersebut meningkat justru lebih banyak keluar, karena penjualan juga di KEK Tanjung Lesung.

Pertumbuhan tenaga kerja unit usaha Batik Cikadu dan Homestay di KEK Tanjung Lesung belum meningkat. Hal ini disebabkan karyawan mereka masih mampu menangani pelanggan yang datang. Hanya saja jika pelanggan sedang meningkat seperti dihari libur maka mereka memakai jasa warga sekitar yang sedang tidak bekerja, dan dijadikan sebagai pegawai *freelance*. Misalnya pelanggan yang datang membutuhkan *tour guide*, maka masyarakatlah yang mengantar. Selain itu, jika permintaan batik meningkat, maka ibu-ibu disekitar Batik Cikadulah yang menjadi pegawai *freelance*. Peningkatan jumlah tenaga kerja hanya dirasakan oleh pelaku UMKM di bidang Rumah makan, karena karyawan Rumah makan selalu bertambah. Sedangkan untuk bidang *Homestay* belum ada peningkatan pegawai. Hal ini, karena banyaknya wisatawan domestik yang datang ke Tanjung Lesung tapi tidak menginap, namun mereka sebagian besar pasti makan di Rumah makan.

Disisi lain pertumbuhan pelanggan yang menggunakan jasa *Homestay* meningkat. Hal ini dikarenakan dijadikannya Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Bahkan yang datang bukan hanya sekali, melainkan sudah menjadi pelanggan setia mereka. Selain itu, yang menjadi pelanggan bukan hanya domestik melainkan pelanggan mancanegara salah satunya ialah wisatawan korea. Hal ini berbeda yang dirasakan oleh UMKM Batik Cikadu bahwa pemasaran di Tanjung Lesung masih sulit, sehingga pelanggan meningkat bukan karena Tanjung Lesung melainkan karena keluarnya SK Bupati yang mewajibkan para pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Pandeglang setiap hari rabu dan kamis untuk memakai Batik Cikadu. Sehingga yang menjadi pelanggan tetap adalah pegawai instansi pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Dampak ekonomi terhadap pendapatan masyarakat mulai meningkat. Dikarenakan semenjak Tanjung mulai sadar dan bergantung pada KEK, hal ini dapat dilihat mulai tumbuhnya usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Seperti *homestay*, rumah makan, kerajinan atau cinderamata, pemandu wisata, dan penyewaan alat *snorkeling*. Selain itu, karyawan di Tanjung Lesung 95% nya adalah masyarakat sekitar. Seperti menjadi pelayan, OB, dan pekerjaan *low skill* lainnya. Sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.

Setelah 5 tahun KEK Tanjung Lesung beroperasi, peningkatan pendapatan masyarakat hanya dialami oleh masyarakat di bidang kepariwisataan yaitu nelayan, pemandu wisata, dan *homestay*. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat belum sepenuhnya meningkat. Karena peningkatan hanya dirasakan oleh masyarakat yang memiliki usaha. Sedangkan yang berprofesi sebagai petani mengalami penurunan pendapatan dikarenakan kurangnya lahan pertanian (Maftuhah, 2017). Dilihat dari dampak KEK terhadap pengurangan pengangguran ada dua yaitu dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsung yaitu terserap sekitar 500 orang yang bekerja di dalam KEK Tanjung Lesung. Dan dampak secara tidak langsungnya tumbuhnya usaha-usaha yang berada diluar kawasan, sehingga masyarakat setempat memiliki usaha. Kedua dampak tersebut sudah dirasakan masyarakat walaupun belum signifikan.

Dari segi wisatawan KEK Tanjung Lesung sudah meningkat. Namun KEK tersebut belum bisa mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Dari hasil survei Gubernur Banten mengatakan bahwa angka pengangguran terbuka di Banten berada di level 8,52 persen pada Agustus 2018 atau sebanyak 496.730 orang. Lebih besar dari rata-rata nasional, bahkan lebih tinggi dari Jawa Barat dan DKI Jakarta (Rifa'i, 2018). Kemudian tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya pengangguran terbuka di Kabupaten Pandeglang. Dapat disimpulkan keberadaan KEK Tanjung Lesung belum memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Selama KEK Tanjung Lesung berjalan sudah memberikan dampak positif. Dengan pantai dan pasir putih serta laut yang jernih, KEK Tanjung Lesung telah menarik baik wisatawan nasional maupun internasional. Selama tahun 2016 tercatat jumlah kunjungan wisatawan sejumlah 570.000

orang dan ditargetkan meningkat hingga 6,1 juta wisatawan saat beroperasi penuh di tahun 2020. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kawasan ekonomi khusus di Indonesia belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Dilihat dari perkembangan KEK di Indonesia KEK Sei Mangke sudah memberikan dampak positif dan KEK Tanjung Lesung. Secara keseluruhan terlihat bahwa keberadaan KEK belum sepenuhnya memberikan dampak positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya KEK perekonomian mulai berjalan kearah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari 2 contoh KEK di Indonesia yaitu KEK Sei Mangke dan KEK Tanjung Lesung. Keberadaan KEK Sei Mangke telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi wilayah dilihat dari sisi makro seperti pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat di Kabupaten Simalungun. Disisi lain KEK Tanjung Lesung belum mengurangi pengangguran, namun KEK Tanjung Lesung sudah memberikan dampak positif terhadap UMKM.

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, maka ada beberapa saran yang dapat di kemukakan :

1. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat, sebaiknya dapat memahami tentang Kawasan Ekonomi Khusus agar dapat memberikan dampak positif.
2. Bagi pemerintah harapannya dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam menangani kendala pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andena, M. 2017. Identifikasi Kondisi Eksiting Infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Berdasarkan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikpwk/article/view/932>
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kabupaten Simalungun dalam Angka*. Simalungun: Badan Pusat Statistik. <https://simalungunkab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kabupaten Pandeglang dalam Angka*. Pandeglang: Badan Pusat Statistik. <https://pandeglangkab.bps.go.id/>
- Devi, S.S. 2018. *Analisis Dampak Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang*. Skripsi. Bogor: Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/94796/1/H18ssd.pdf>
- Julita, L. 2018. *Begini Nasib Kawasan Ekonomi Khusus Saat Ini*. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20180828135834-4-30557/begini-nasib-kawasanekonomi-khusus-saat-ini./](https://www.cnbcindonesia.com/news/20180828135834-4-30557/begini-nasib-kawasanekonomi-khusus-saat-ini/)
- Komala, I. 2015. *Implementasi Kebijakan dan Kendala Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten*. Skripsi. Serang: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <http://repository.fisipuntirta.ac.id/583/1/2.%20%20IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20DAN%20KENDALA%20PENGEMBANGAN%20KAWASAN%20EKONOMI%20KHUSUS%20%28KEK%29%20PARIWISATA%20-%20Co%20py.pdf> tanggal 15 Mei 2019
- Maftuhah, T. 2017, *Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten*. Skripsi. Serang: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <http://repository.fisipuntirta.ac.id/898/1/DAMPAK%20PEMBANGUNAN%20KAWASAN%20EKONOMI%20KHUSUS%20%28KEK%29%20TERHADAP%20PERTUMBUHAN%20USAHA%20MIKRO%20KECIL%20DAN%20MENENG%20-%20Copy.pdf>

- Rifa'i. B, 2018. Pengangguran di Banten Terbanyak Se-Indonesia, Ini Kata Gubernur. [https://news.detik.com/berita/d-4289692/peng_angguran-di-banten-terbanyak-se-indonesia-inikata-gubernur/komentar](https://news.detik.com/berita/d-4289692/peng-angguran-di-banten-terbanyak-se-indonesia-inikata-gubernur/komentar)
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suteja, W. 2018. Potensi Kuliner Lokal dalam Menunjang *Cullinary Tourism* di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. *Media Bina Ilmiah*. 18 (11): 738-744.